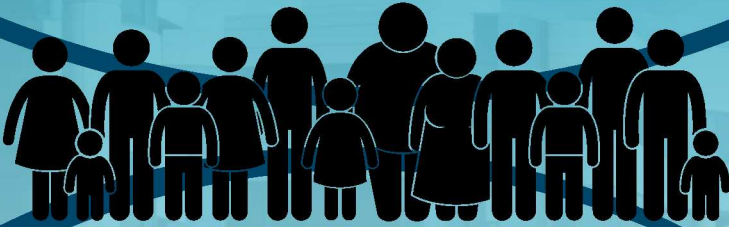


AKUNTANSI

SEKTOR PUBLIK



Penulis :

- Margie Christanty Poluan
- Franki Maikal Paath
- Steify M. E. W. Sepang
- Ignatia Rosali Honandar
- Erick Alamsyah Andreas Sumakud
- Octavianus Marcello Tertius Muaja
- Ignatius Rolly Coun Rorah
- Frankie Jantje Hendrikus Taroreh
- Mc Donald Ferdinand Steven Porajow

ISBN 978-623-89964-5-2 (PDF)



9

786238

996452

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Margie Christanty Poluan

Franki Maikal Paath

Steify M. E. W. Sepang

Ignatia Rosali Honandar

Erick Alamsyah Andreas Sumakud

Octavianus Marcello Tertius Muaja

Ignatius Rolly Coun Rorah

Frankie Jantje Hendrikus Taroreh

Mc Donald Ferdinand Steven Porajow



CV PUSTAKA INSPIRASI MINANG

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Penulis :

Margie Christanty Poluan
Franki Maikal Paath
Steify M. E. W. Sepang
Ignatia Rosali Honandar
Erick Alamsyah Andreas Sumakud
Octavianus Marcello Tertius Muaja
Ignatius Rolly Coun Rorah
Frankie Jantje Hendrikus Taroreh
Mc Donald Ferdinand Steven Porajow

ISBN : 978-623-89964-5-2

Editor : Ari Novendra , M.Pd dan Gusmalia, S.Pd. Gr.

Penyunting : Annisa, S.Pd. Gr.

Desain Sampul dan Tata Letak : Wanda Apri Yeni, S.pd, Gr

Penerbit : CV. PUSTAKA INSPIRASI MINANG

Nomor IKAPI 053/SBA/2024

Redaksi :

Jl. Pengambiran Permai 2 Blok C No 7,
Kel. Ampalu Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat
Website : <https://pustakainspirasi.com/>
Email : pustakainspirasiminang@gmail.com

Cetakan pertama, Juni 2025

Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang memperbanyak karya tulis ini
dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan berkatNya, maka Penulisan Buku dengan judul Akuntansi Sektor Publik dapat diselesaikan. Buku ini membahas seputar Gambaran Umum Akuntansi Sektor Publik, Ruang Lingkup Dan Karakteristik Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Manajemen Sektor Publik, Penganggaran Sektor Publik Dan Jenis-Jenis Anggaran Sektor Publik, Badan Usaha Milik Pemerintah Dan Badan Layanan Umum, Penentuan Harga Pelayanan Publik, Pengukuran Kinerja Dan Pelaporan Keuangan, Akuntansi Keuangan Sektor Publik, Prinsip-Prinsip Moral Auditor Sektor Publik, Auditing Sektor Publik, Dan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Buku ini masih banyak kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan buku ini selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Buku ini. Semoga Buku ini dapat menjadi sumber referensi dan literatur yang mudah dipahami.

Padang, Juni 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB 1 GAMBARAN UMUM AKUNTANSI SEKTOR	
PUBLIK.....	1
1.1 Pendahuluan	1
1.2 <i>Domain</i> Akuntansi Sektor Publik dan ruang lingkup Sektor Publik	12
1.3 Peran Akuntansi Sektor Publik	15
1.4 Keterkaitan Keuangan Negara dan Daerah dengan ASP	22
DAFTAR PUSTAKA	27
BAB 2 RUANG LINGKUP DAN KARAKTERISTIK	
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK	29
2.1 Lingkup Akuntansi Sektor Publik	29
2.2 Negara dan pemerintah sebagai sasaran Akuntansi Sektor Publik	34
2.3 Ruang Lingkup Keuangan Negara	39
2.4 <i>Value For Money</i>	45
2.4.1 Konsep <i>Value for Money</i> (VfM) dalam Pengelolaan Keuangan Publik	49
2.4.2 Tiga Pilar Utama dalam Konsep <i>Value for Money</i> : Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas	50
2.4.3 Faktor Pendorong Peningkatan <i>Value for Money</i> dalam Skema PPP	51

2.4.4 Metode Analisis <i>Value for Money</i>	52
2.5 Manfaat Analisis <i>Value for Money</i>	52
2.5.1 Implementasi Analisis <i>Value for Money</i> dalam Sektor Publik	52
2.5.2 Komponen-Komponen <i>Value for Money</i> (VfM)	54
DAFTAR PUSTAKA	57
BAB 3 AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK	59
3.1 Pendahuluan.....	59
3.2 Definisi Akuntansi Manajemen Sektor Publik	60
3.2.1 Definisi dan Ruang Lingkup Akuntansi Manajemen Sektor Publik	60
3.2.2 Perbedaan Akuntansi Manajemen Sektor Publik dan Sektor Swasta.....	61
3.3 Fungsi Akuntansi Manajemen Sektor Publik.....	61
3.3.1 Alat Perencanaan Organisasi.....	62
3.3.2 Pengendalian Organisasi	64
3.4 Kesimpulan	67
DAFTAR PUSTAKA	69
BAB 4 PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK DAN JENIS - JENIS ANGGARAN SEKTOR PUBLIK	71
4.1 Pendahuluan.....	71
4.2 Penganggaran Sektor Publik.....	74
4.3 Jenis-Jenis Anggaran Sektor Publik.....	80
DAFTAR PUSTAKA	86

BAB 5 BADAN USAHA MILIK PEMERINTAH DAN BADAN LAYANAN UMUM	87
5.1 Pendahuluan	87
5.2 Badan Usaha Milik Negara.....	87
5.2.1 Definisi dan Dasar Hukum	87
5.2.2 Standar Akuntansi untuk BUMN	88
5.2.3 Jenis-Jenis BUMN	88
5.2.4 Fungsi dan Peran BUMN	89
5.2.5 Pelaporan Keuangan dan Transparansi.....	90
5.2.6 Tantangan dan Peluang dalam Pengelolaan Keuangan BUMN.....	91
5.3 Badan Layanan Umum.....	91
5.3.1 Definisi dan Dasar Hukum	91
5.3.2 Karakteristik dan Ciri-Ciri Badan Layanan Umum	92
5.3.3 Contoh Badan Layanan Umum.....	93
5.3.4 Pengelolaan Keuangan BLU	93
5.3.5 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU.....	94
5.3.6 Tantangan dalam Pengelolaan Badan Layanan Umum ..	95
DAFTAR PUSTAKA	96
BAB 6 PENENTUAN HARGA PELAYANAN PUBLIK	99
6.1 Pendahuluan	99
6.2 Prinsip Penentuan Harga Dalam Pelayanan Publik	100
6.3 Konsep Penentuan Harga Dalam Pelayanan Publik	100
6.4 Metode Penentuan Harga Dalam Pelayanan Publik.....	102
6.5 Faktor Yang Mempengaruhi Penentuan Harga Pelayanan	

Publik.....	103
6.6 Tantangan Dalam Penentuan Harga Pelayanan Publik	104
6.7 Contoh Studi Kasus.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	106

BAB 7 PENGUKURAN KINERJA DAN PELAPORAN

KEUANGAN	107
7.1 Pendahuluan.....	107
7.2 Konsep Dasar Dalam Pengukuran Kinerja Sektor Publik....	108
7.2.1 Definisi Pengukuran Kinerja Sektor Publik	108
7.2.2 Tujuan Sistem Pengukuran Kinerja Sektor Publik.....	109
7.3 Metode Dan Indikator Pengukuran Kinerja.....	110
7.3.1 Pendekatan Kuantitatif	110
7.3.2 Pendekatan Kualitatif.....	112
7.4 Pelaporan Keuangan Dalam Sektor Publik.....	113
7.4.1 Tujuan Pelaporan Keuangan dalam Sektor Publik	113
7.4.2 Pemakai Laporan Keuangan Sektor Publik dan Kepentingannya.....	114
7.4.3 Luas Pengungkapan (<i>Disclosure</i>) yang Diperlukan.....	116
7.4 Rangkuman.....	117
DAFTAR PUSTAKA.....	118

BAB 8 AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK 119

8.1 Pengenalan Akuntansi Keuangan Sektor Publik.....	119
8.1.1 Definisi dan Cakupan Akuntansi Keuangan Sektor Publik.....	119
8.1.2 Pentingnya Akuntansi Keuangan dalam Pengelolaan	

Keuangan Negara.....	120
8.1.3 Perkembangan Akuntansi Keuangan Sektor Publik di Indonesia	122
8.1.4 Isu Terkini dalam Akuntansi Keuangan Sektor Publik...	123
8.2 Dasar-Dasar Akuntansi Keuangan Sektor Publik	124
8.2.1 Prinsip-Prinsip Akuntansi Keuangan Sektor Publik	124
8.2.2 Sistem Pembukuan dan Pelaporan Keuangan	126
8.2.3 Peran Auditor dalam Akuntansi Keuangan Sektor Publik.....	127
8.2.4 Penyusunan Laporan Keuangan Sektor Publik.....	129
8.3 Pengelolaan Anggaran dan Dana Publik	130
8.3.1 Proses Perencanaan Anggaran di Sektor Publik	130
8.3.2. Sistem Anggaran Berbasis Kinerja.....	132
8.3.3 Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Luar Negeri.....	135
8.3.4 Peran Teknologi dalam Pengelolaan Anggaran.....	136
8.4 Sistem Pengendalian Internal dan Akuntabilitas	138
8.4.1 Pengendalian Internal dalam Akuntansi Keuangan Sektor Publik.....	138
8.4.2 Manajemen Risiko dalam Keuangan Sektor Publik	140
8.4.3 Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan.....	142
8.4.4 Pengawasan dan Evaluasi Keuangan Sektor Publik.....	145
8.5 Tantangan dan Isu Terkini dalam Akuntansi Keuangan Sektor Publik.....	147
8.5.1 Digitalisasi dan Sistem Informasi Keuangan Sektor Publik.....	147

8.5.2. Reformasi Akuntansi di Sektor Publik	149
8.5.3 Kepatuhan Terhadap Standar Internasional dalam Akuntansi Sektor Publik	151
8.5.4 Kasus Korupsi dan Pengelolaan Keuangan Negara	153
8.6 Studi Kasus dan Best Practices dalam Akuntansi Keuangan Sektor Publik.....	155
8.6.1 Studi Kasus: Pengelolaan Anggaran di Pemerintah Daerah	155
8.6.2 Studi Kasus: Pengelolaan Dana Hibah dalam Program Pendidikan.....	157
8.6.3 <i>Best Practices</i> Pengendalian Internal dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Negara	160
8.6.4 Peran Teknologi dalam Meningkatkan Efisiensi dan Akuntabilitas	162
DAFTAR PUSTAKA	164

BAB 9 PRINSIP-PRINSIP MORAL AUDITOR SEKTOR

PUBLIK	165
9.1 Pendahuluan.....	165
9.2 Prinsip-Prinsip Moral Auditor	167
9.2.1 Integritas	168
9.2.2 Objektivitas	170
9.2.3 Kompetensi Profesional dan Kehati-hatian	172
9.2.4 Kerahasiaan.....	174
9.2.5 Perilaku Profesional	176
9.2.6 Tanggung Jawab Publik	178
9.3 Implikasi terhadap Akuntabilitas Sektor Publik	180

9.4 Penutup	183
DAFTAR PUSTAKA	185
BAB 10 AUDITING SEKTOR PUBLIK	187
10.1 Konsep Dasar <i>Auditing</i> Sektor Publik	187
10.1.1 Pengertian dan Karakteristik Audit Sektor Publik	187
10.1.2 Perbedaan Audit Sektor Publik dan Audit Sektor Privat	189
10.1.3 Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Sektor Publik	190
10.1.4 Profesi Auditor Sektor Publik: Etika dan Kompetensi	192
10.2 Standar dan Kerangka Regulasi Audit Sektor Publik	195
10.2.1 Landasan Hukum dan Regulasi Audit Sektor Publik di Indonesia	195
10.2.2 Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)	196
10.2.3 Standar Internasional: ISSAI dan Implikasinya di Indonesia	198
10.2.4 Audit Berbasis Risiko dan Teknologi: Praktik Kontemporer	200
10.3 Proses Audit Sektor Publik	202
10.3.1 Perencanaan Audit: Strategi, Penilaian Risiko, dan Penetapan Tujuan	202
10.3.2 Pelaksanaan Audit: Pengumpulan Bukti dan Teknik Pemeriksaan	203
10.3.3 Dokumentasi dan Analisis Temuan Audit	205
10.3.4 Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut	207
10.4 Jenis-Jenis Audit Sektor Publik dan Pendekatannya	208

10.4.1 Audit Keuangan: Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah	208
10.4.2 Audit Kinerja: Efektivitas, Efisiensi, dan Ekonomis	210
10.4.3 Audit Kepatuhan: Penegakan Hukum dan Regulasi ...	211
10.4.4 Audit dengan Tujuan Tertentu: Investigasi dan Audit Tematik.....	212
10.5 Standar dan Prinsip Audit Sektor Publik.....	214
10.5.1 Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) di Indonesia	214
10.5.2 <i>International Standards of Supreme Audit Institutions</i> (ISSAI)	215
10.5.3 Prinsip-Prinsip Audit Publik: Integritas, Independensi, dan Akuntabilitas	217
10.5.4 Harmonisasi Standar Audit Nasional dan Internasional.....	218
10.6 Proses Audit Sektor Publik: Perencanaan hingga Tindak Lanjut	219
10.6.1 Perencanaan Audit: Penentuan Ruang Lingkup dan Strategi Pemeriksaan.....	219
10.6.2 Pelaksanaan Pemeriksaan: Pengumpulan dan Analisis Bukti Audit	221
10.6.3 Pelaporan Audit: Penyusunan Temuan dan Rekomendasi	222
10.6.4 Tindak Lanjut dan Pemantauan Rekomendasi.....	223
DAFTAR PUSTAKA	226
BAB 11 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN	229
11.1 Pendahuluan.....	229

11.2 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	234
11.3 Tujuan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	255
11.4 Tantangan Dalam Akuntansi Pemerintahan	256
DAFTAR PUSTAKA	258
BIODATA PENULIS	260

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1

Skema <i>Value for Money</i>	45
------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1

Perbedaan Akuntansi Manajemen Sektor Publik dan Sektor Swasta	61
---	----

Tabel 4.1

Realisasi Pengeluaran Negara Indonesia s/d Februari 2025	73
--	----

Tabel 4.2

Perbedaan Sistem Penganggaran di Amerika dan Indonesia	74
--	----

Tabel 4.3

Perbandingan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Amerika Serikat dan Indonesia	76
--	----

Tabel 11.1

Perbedaan laporan keuangan pemerintah dengan laporan keuangan sektor swasta	229
---	-----

Tabel 11.2

Perbandingan laporan keuangan yang dihasilkan	238
---	-----

BAB 1

GAMBARAN UMUM AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Oleh: Margie Christanty Poluan, S.E., M.S.A.

1.1 Pendahuluan

Pembahasan mengenai Sektor Publik mengacu pada suatu entitas yang memiliki karakteristik unik. Disebut entitas karena sektor ini mengelola sumber daya ekonomi dalam jumlah besar. Meskipun organisasi sektor publik juga melakukan aktivitas ekonomi dan keuangan, namun berbeda dengan entitas bisnis komersial yang berorientasi pada laba. Sektor publik mengelola sumber dayanya bukan untuk menghasilkan keuntungan, melainkan untuk tujuan non-profit. Fokus utama dari sektor ini adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Saputro (2014), organisasi sektor publik memiliki beberapa ciri khas, yaitu:

1. Tidak beroperasi untuk memperoleh keuntungan finansial.
2. Dimiliki secara bersama oleh masyarakat.
3. Kepemilikan sumber daya tidak diwakili oleh saham yang bisa diperdagangkan.
4. Pengambilan keputusan, baik dalam kebijakan maupun operasional, dilakukan melalui kesepakatan bersama.

Istilah "Sektor Publik" pertama kali muncul pada tahun 1952, saat itu sektor ini dianggap sebagai bagian dari manajemen ekonomi makro yang berhubungan dengan

pembangunan serta institusi pelaksana pembangunan (Mardiasmo, 2009). Istilah lain juga tentang sektor publik merujuk pada sektor yang mencakup pemerintahan, badan usaha milik negara, serta organisasi nirlaba milik negara. Abdullah (1996) dalam Yusra (2016) menjelaskan bahwa sektor publik mencakup pemerintah dan seluruh unit organisasinya, yaitu lembaga-lembaga yang dikelola oleh pemerintah dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan dasar masyarakat, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Oleh karena itu, wajar jika sektor publik sering diidentikkan dengan aspek perpajakan, birokrasi, atau pemerintahan itu sendiri.

Istilah ini juga menjadi lebih jelas jika dibandingkan dengan konsep akuntan publik. Di Amerika Serikat, akuntan publik adalah akuntan profesional yang memberikan layanan kepada masyarakat umum secara independen. Sementara di Inggris dan beberapa negara Eropa, akuntan publik merujuk pada akuntan yang bekerja di lingkungan organisasi pemerintahan. Pemerintahan yang dimaksud mencakup berbagai tingkatan, mulai dari pusat hingga daerah seperti provinsi dan kabupaten/kota.

Organisasi pelayanan publik adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah sebagai sarana untuk menyediakan layanan kepada masyarakat. Pemerintah merancang sistem administrasi dan birokrasi yang terstruktur untuk memastikan layanan publik dapat diberikan secara maksimal, mengingat pelayanan ini merupakan kebutuhan esensial masyarakat terhadap peran negara dan pemerintah (Rendy, 2016).

Organisasi pelayanan publik merupakan lembaga yang

dibentuk oleh pemerintah untuk memberikan layanan kepada seluruh warga negara. Pelayanan ini dapat dilakukan secara langsung melalui instansi pemerintah atau secara tidak langsung dengan mendanai layanan yang disediakan oleh pihak swasta. Masyarakat mengharapkan pelayanan publik dijalankan dengan jujur, pengelolaan dana yang efisien, serta adanya akuntabilitas terhadap publik, dengan tujuan utama memenuhi kepentingan masyarakat luas.

Menurut Mahmudi (2010), dalam menyelenggarakan layanan publik, instansi terkait perlu memperhatikan prinsip-prinsip dasar pelayanan publik sebagai berikut:

1. Transparansi – Layanan harus diberikan secara terbuka, mudah diakses, tersedia secara memadai, serta disampaikan dengan cara yang mudah dipahami.
2. Akuntabilitas – Setiap bentuk pelayanan publik harus bisa dipertanggungjawabkan sesuai aturan hukum yang berlaku.
3. Kondisional – Pelayanan harus disesuaikan dengan kondisi serta kemampuan baik dari sisi penyedia maupun penerima layanan, dengan tetap menjunjung prinsip efisiensi dan efektivitas.
4. Partisipatif – Penyelenggaraan pelayanan perlu melibatkan masyarakat, dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan publik.
5. Non-diskriminatif – Layanan publik harus diberikan secara adil tanpa membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, maupun status sosial dan ekonomi.

6. Keseimbangan hak dan kewajiban – Baik pemberi maupun penerima layanan harus saling memenuhi hak dan tanggung jawab masing-masing.

Sementara itu, akuntansi sektor publik sangat erat kaitannya dengan penerapan prinsip-prinsip akuntansi dalam ruang lingkup organisasi publik. Wilayah sektor publik jauh lebih luas dan kompleks dibandingkan sektor swasta, baik dari segi jenis organisasi maupun lingkungannya. Ruang lingkup organisasi publik mencakup instansi pemerintah (pusat dan daerah), BUMN/BUMD, organisasi politik, yayasan, LSM, universitas, hingga berbagai organisasi nirlaba lainnya. Kompleksitas ini tidak hanya bersumber dari keragaman organisasi, tetapi juga karena banyaknya faktor eksternal yang memengaruhi, termasuk aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, hingga sejarah yang membentuk dinamika sektor publik.

Menurut Bastian (2010:3) dalam Sarwenda (2018), Akuntansi Sektor Publik merupakan serangkaian teknik, mekanisme, dan analisis akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan dana masyarakat oleh berbagai institusi, seperti lembaga tinggi negara, kementerian dan lembaga di bawahnya, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta yayasan sosial, termasuk proyek-proyek kolaborasi antara sektor publik dan swasta. Sementara itu, Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa akuntansi sektor publik berfungsi sebagai alat penyedia informasi, baik bagi manajemen pemerintahan maupun bagi masyarakat umum.

Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik merupakan sebuah aktivitas jasa yang berkaitan dengan pengelolaan, khususnya dalam aspek keuangan, yang bertujuan mendukung pengambilan keputusan guna memenuhi kebutuhan serta hak-hak masyarakat melalui penyelenggaraan pelayanan publik oleh organisasi yang bersifat publik.

Menurut Bastian (1999), untuk memahami definisi akuntansi sektor publik secara lebih komprehensif, kita perlu merujuk pada beberapa literatur. Dalam buku-buku beraliran Anglo-Amerika, akuntansi sektor publik dianggap sebagai penerapan prinsip-prinsip akuntansi sektor swasta dalam praktik organisasi publik. Sedangkan dalam literatur klasik Eropa Barat, istilah akuntansi sektor publik sering digunakan secara sinonim dengan akuntansi pemerintahan.

Dalam konteks reformasi pengelolaan keuangan negara, Pemerintah Indonesia telah menetapkan kewajiban bagi seluruh entitas sektor publik, baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan yang transparan dan akuntabel.

Penerapan sistem ini merupakan bagian integral dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang secara eksplisit mengatur bahwa entitas pemerintah wajib mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual mulai tahun 2015. Standar ini diterapkan sebagai bagian dari upaya

peningkatan kualitas informasi keuangan pemerintah agar lebih relevan, andal, dan dapat dibandingkan, serta guna memperkuat landasan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan kebijakan publik.

Sebagai bentuk dukungan terhadap implementasi PP No. 71 Tahun 2010 tersebut, pemerintah kemudian menerbitkan beberapa regulasi teknis yang memperkuat komitmen tersebut. Di tingkat pemerintah pusat, kebijakan ini diperkuat dengan lahirnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 270/PMK.05/2014 yang mengatur secara rinci mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan kementerian/lembaga. Sementara itu, untuk pemerintah daerah, pengaturan teknis dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, yang menjadi pedoman bagi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam melaksanakan akuntansi berbasis akrual pada seluruh unit kerjanya.

Adopsi SAP berbasis akrual ini diyakini membawa implikasi positif terhadap peningkatan kualitas tata kelola keuangan negara. Melalui pendekatan akrual, laporan keuangan pemerintah tidak hanya mencerminkan transaksi berbasis kas, tetapi juga mencatat hak dan kewajiban yang timbul pada periode akuntansi berjalan. Dengan demikian, informasi yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif dan akurat, sehingga dapat menjadi alat bantu yang efektif dalam evaluasi kinerja pemerintah serta perencanaan dan pengambilan keputusan. Lebih lanjut, penerapan sistem ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya prinsip-prinsip

transparansi dan akuntabilitas publik secara lebih nyata, yang merupakan pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Transformasi signifikan dalam sistem akuntansi sektor publik di Indonesia mulai tampak seiring dengan reformasi kelembagaan dan regulasi yang dilaksanakan pada awal abad ke-21. Reformasi ini ditandai dengan lahirnya sejumlah perundang-undangan penting yang menjadi fondasi hukum bagi pengelolaan keuangan negara yang lebih modern dan akuntabel, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Melalui kedua regulasi tersebut, pemerintah berupaya mengintegrasikan praktik akuntansi publik Indonesia dengan standar praktik internasional, yang pada umumnya telah mengadopsi pendekatan berbasis akrual dalam pelaporan keuangan sektor publik.

Salah satu fokus utama dari perubahan ini adalah pada strategi transisi basis akuntansi, yang merupakan elemen krusial dalam pembentukan arsitektur sistem keuangan negara. Transisi tersebut merupakan mandat eksplisit dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa akuntansi sektor publik harus dikembangkan ke arah sistem pelaporan yang mencerminkan kondisi keuangan secara menyeluruh dan akurat. Sebagai tindak lanjut dari mandat tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang menjadi kerangka acuan utama dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. SAP

merupakan regulasi teknis yang menetapkan prinsip-prinsip dasar dan prosedur akuntansi pemerintahan, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam panduan dan sistem aplikasi yang lebih operasional di masing-masing instansi.

Pada tahap awal implementasinya, SAP sebagaimana diatur dalam PP No. 24 Tahun 2005 menggunakan sistem basis kas menuju akrual. Artinya, pengakuan terhadap pendapatan, belanja, dan pembiayaan dilakukan dengan basis kas, sementara pengakuan terhadap aset, kewajiban, dan ekuitas dilakukan menggunakan basis akrual. Pendekatan ini bersifat transisional, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa sebelum pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dapat diimplementasikan sepenuhnya, maka sistem pengakuan dan pengukuran berbasis kas masih dapat digunakan. Undang-undang tersebut juga menetapkan batas waktu selama lima tahun bagi pemerintah untuk menyempurnakan penerapan akuntansi berbasis akrual secara penuh. Oleh karena itu, PP No. 24 Tahun 2005 dipandang sebagai regulasi sementara yang pada akhirnya perlu disempurnakan atau digantikan dengan peraturan baru yang mengatur secara eksplisit implementasi akuntansi berbasis akrual secara menyeluruh.

Tahun 2015 menjadi tonggak sejarah dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual secara nasional di lingkungan pemerintahan Indonesia. Namun demikian, implementasi sistem ini tidak serta-merta berjalan tanpa hambatan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, khususnya

dalam hal kompetensi teknis untuk menyusun laporan keuangan berbasis akrual. Sistem akuntansi ini memerlukan pemahaman yang lebih kompleks dibandingkan akuntansi berbasis kas, karena mencakup pengakuan terhadap elemen-elemen laporan keuangan seperti piutang, kewajiban jangka panjang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi. Kurangnya pelatihan dan keterbatasan pemahaman terhadap aspek teknis ini telah menjadi hambatan dalam pencapaian kualitas pelaporan yang diharapkan.

Walaupun menantang dalam penerapannya, akuntansi berbasis akrual diyakini memiliki keunggulan substansial dibandingkan sistem berbasis kas. Akuntansi akrual memungkinkan penyajian laporan keuangan yang lebih lengkap, akurat, dan dapat diandalkan, karena mencerminkan seluruh hak dan kewajiban entitas pemerintah dalam suatu periode akuntansi. Informasi keuangan yang dihasilkan tidak hanya relevan untuk kebutuhan akuntabilitas publik, tetapi juga bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik yang strategis. Dalam konteks sektor publik, penggunaan basis akrual dapat membantu pemerintah menghitung secara lebih tepat total biaya yang diperlukan untuk penyediaan layanan publik kepada masyarakat.

Pentingnya pengelolaan keuangan sektor publik dengan pendekatan yang transparan dan akuntabel juga tercermin dari kenyataan bahwa sektor publik memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan stabilitas dan perkembangan sektor swasta maupun sosial. Kegagalan dalam mengelola sektor publik dapat menimbulkan berbagai

konsekuensi serius, seperti stagnasi birokrasi, lemahnya penegakan hukum, maraknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta instabilitas politik dan keamanan. Fenomena-fenomena tersebut dapat memicu krisis multidimensi yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Oleh karena itu, implementasi akuntansi berbasis akrual dalam sektor publik bukan hanya merupakan tuntutan teknis administratif, tetapi juga bagian integral dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Dalam upaya membangun dan memperkuat fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkelanjutan, pembangunan sektor publik merupakan suatu keharusan strategis yang tidak boleh diabaikan. Pembangunan sektor ini memiliki peran krusial dalam menunjang pertumbuhan dan stabilitas di berbagai dimensi kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, politik, dan budaya.

Seperti yang diungkapkan oleh Mahmudi (2011), sektor publik harus senantiasa dikembangkan secara konsisten dan terencana agar mampu berkontribusi secara optimal terhadap kemajuan nasional. Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menganut sistem ekonomi campuran antara kapitalisme dan sosialisme, menjadikan sektor publik sebagai salah satu pilar utama dalam struktur ekonomi, sosial, dan politiknya. Oleh sebab itu, kualitas dan kapabilitas sektor publik akan sangat menentukan arah serta kecepatan kemajuan bangsa secara keseluruhan.

Dalam beberapa dekade terakhir, khususnya sejak era reformasi, bidang akuntansi sektor publik di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam waktu yang relatif singkat. Perkembangan ini dipicu oleh meningkatnya kesadaran akan pentingnya tata kelola keuangan publik yang akuntabel dan transparan. Saat ini, perhatian masyarakat, akademisi, dan para pemangku kepentingan terhadap praktik akuntansi yang diterapkan oleh institusi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D), serta berbagai organisasi publik lainnya semakin besar dibandingkan dengan masa sebelumnya. Masyarakat kini menuntut tingkat transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam pengelolaan keuangan publik, sejalan dengan prinsip-prinsip good governance.

Dalam hal klasifikasi struktur sosial dan ekonomi, Mahmudi (2011) membedakan keberadaan tiga sektor utama dalam perekonomian, yakni sektor swasta, sektor publik, dan sektor sosial. Masing-masing sektor memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda, namun saling melengkapi dalam menciptakan keseimbangan ekonomi nasional.

Sementara itu, Mardiasmo (2018) mengelompokkan sistem ekonomi hanya dalam dua sektor, yaitu sektor swasta dan sektor publik, dengan mengacu pada ciri khas masing-masing dalam fungsi dan pengelolaannya. Terlepas dari perbedaan klasifikasi tersebut, ketiga sektor ini berperan penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi bangsa, terlebih dalam situasi krisis seperti pandemi Covid-19 yang berdampak secara luas pada seluruh lapisan masyarakat. Interaksi antarsektor ini akan dibahas lebih lanjut dalam bab

berikutnya, disertai dengan uraian mengenai karakteristik spesifik serta contoh konkret dari masing-masing sektor, guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam.

Sejalan dengan semakin kompleksnya tuntutan masyarakat dan dinamika lingkungan strategis, organisasi-organisasi dalam sektor publik kini menghadapi tekanan yang semakin besar untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam menjalankan fungsi-fungsi pelayanan publik. Dalam konteks ini, akuntansi publik memperoleh peran yang semakin penting dan tidak dapat dipisahkan dari proses manajemen pemerintahan yang modern.

Penggunaan sistem akuntansi memungkinkan organisasi publik untuk mengukur kinerja, mengevaluasi kebijakan, serta mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya secara sistematis dan obyektif. Meskipun pada awalnya akuntansi sektor publik dipandang sebagai bidang yang sempit dan terbatas dalam lingkup profesi tertentu, saat ini disiplin tersebut telah berkembang menjadi bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang profesional dan transparan. Dengan demikian, akuntansi sektor publik tidak lagi hanya sebagai alat pelaporan, tetapi telah bertransformasi menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

1.2 Domain Akuntansi Sektor Publik dan ruang lingkup Sektor Publik

Pengertian umum dari Akuntansi sektor publik adalah

sistem pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan yang dilakukan oleh entitas publik seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga non-profit milik negara, dan lembaga pelayanan publik. Tujuan utamanya adalah memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara demi kepentingan masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2019), domain sektor publik mencakup entitas yang kegiatannya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik, termasuk Badan-badan Pemerintahan, perusahaan milik Negara, Yayasan, Organisasi Politik dan Organisasi Massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Universitas, dan organisasi keagamaan. sebagai berikut:

1. Entitas Pelaporan

Entitas ini merupakan organisasi yang bertanggung jawab menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. Contohnya:

- a. Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga)
- b. Pemerintah Daerah (Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota)
- c. Badan Layanan Umum (BLU) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
- d. Lembaga-lembaga otonom yang menerima dana public

2. Sistem Akuntansi Sektor Publik

Sistem ini terdiri atas kebijakan, prosedur, dan perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola data keuangan. Sistem ini mengikuti standar yang berlaku seperti:

- a. SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan)
- b. Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
- c. Peraturan Daerah (untuk pemerintah daerah)

3. Proses Akuntansi

Beberapa tahapan utama dalam proses akuntansi sektor publik meliputi:

- a. Pengakuan: Menentukan kapan suatu transaksi dicatat.
- b. Pengukuran: Menilai nilai transaksi dalam satuan moneter.
- c. Pencatatan: Mencatat transaksi dalam buku besar.
- d. Pelaporan: Menyusun laporan keuangan untuk berbagai pihak.

4. Jenis Transaksi

Transaksi yang umum dalam sektor publik mencakup:

- a. Pendapatan: Pajak, retribusi, hibah, dana transfer.
- b. Belanja: Belanja pegawai, barang, modal, dan bantuan sosial.
- c. Aset & Kewajiban: Investasi pemerintah, utang, dan piutang.
- d. Transfer Antar Entitas: Dana perimbangan dari pusat ke daerah, atau antar unit kerja.

5. Laporan Keuangan

Laporan keuangan utama dalam sektor publik terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA): Perbandingan antara anggaran dan realisasi.
- b. Laporan Operasional (LO): Menunjukkan kinerja operasional pemerintah.
- c. Neraca: Menampilkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas.
- d. Laporan Arus Kas (LAK): Menjelaskan aliran kas masuk dan keluar.

- e. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE): Perubahan modal pemerintah.

6. Pengguna Informasi Akuntansi

Informasi keuangan sektor publik digunakan oleh:

- a. Pemerintah: Untuk pengambilan keputusan.
- b. Legislatif (DPR/DPRD): Untuk pengawasan dan evaluasi anggaran.
- c. Masyarakat: Untuk mengetahui penggunaan uang rakyat.
- d. Auditor: Untuk pemeriksaan dan evaluasi keandalan laporan.

1.3 Peran Akuntansi Sektor Publik

Menurut pandangan Halim (2013), informasi akuntansi yang dihasilkan oleh suatu entitas tidak hanya digunakan oleh pihak internal organisasi, tetapi juga memiliki signifikansi yang tinggi bagi pihak-pihak eksternal. Untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pengguna eksternal tersebut, dikembangkanlah suatu cabang khusus dalam disiplin ilmu akuntansi yang dikenal sebagai Akuntansi Keuangan. Cabang ilmu ini berfokus pada penyusunan laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip dan standar yang dapat diterima secara umum. Laporan keuangan yang dihasilkan dari proses akuntansi keuangan memiliki peran strategis sebagai salah satu landasan penting dalam pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan di luar organisasi, seperti investor, kreditor, lembaga pengawas, dan publik secara umum.

Dalam konteks Akuntansi Sektor Publik (ASP), pendekatan dan fokus pelaporannya memiliki karakteristik yang berbeda dari akuntansi keuangan sektor swasta, karena erat kaitannya dengan mekanisme penganggaran yang menjadi fondasi utama pengelolaan keuangan publik. Oleh karena itu, jenis laporan keuangan yang menjadi sorotan utama dalam praktik akuntansi sektor publik adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Laporan ini menyajikan informasi mengenai perbandingan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi penerimaan dan pengeluaran yang terjadi dalam periode tertentu, sehingga memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja fiskal dan tingkat akuntabilitas pengelolaan anggaran oleh entitas publik. Untuk itu Akuntansi sektor publik memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan pengelolaan keuangan negara atau entitas publik dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel. Berikut adalah beberapa peran utama dari akuntansi sektor publik menurut yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan Transparansi.

Akuntansi sektor publik membantu dalam menyediakan informasi keuangan yang transparan terkait dengan penerimaan dan pengeluaran dana publik. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan publik memungkinkan masyarakat, parlemen, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami bagaimana dana publik digunakan dan diatur.

2. Meningkatkan Akuntabilitas

Akuntansi sektor publik memungkinkan entitas pemerintahan dan organisasi nirlaba untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik. Dengan sistem akuntansi yang baik, pemerintah dapat memberikan laporan yang menunjukkan kinerja dan bagaimana mereka mencapai tujuan yang diamanatkan kepada mereka, baik dari segi finansial maupun layanan publik.

3. Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik

Informasi keuangan yang akurat dan relevan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi sektor publik membantu para pembuat kebijakan dan pemimpin pemerintahan dalam membuat keputusan yang lebih baik. Informasi ini mencakup perencanaan anggaran, alokasi sumber daya, dan evaluasi program serta kebijakan publik.

4. Pengendalian Anggaran

Akuntansi sektor publik membantu pemerintah dan lembaga nirlaba dalam memantau realisasi anggaran dan mengendalikan pengeluaran. Dengan adanya sistem akuntansi yang baik, lembaga pemerintah dapat memastikan bahwa mereka tidak melebihi anggaran yang telah disetujui oleh parlemen atau badan yang berwenang, serta menjaga agar dana publik digunakan secara efektif.

5. Pengawasan dan Audit

Sistem akuntansi sektor publik memungkinkan pengawasan yang lebih baik terhadap keuangan publik. Laporan keuangan yang dihasilkan dapat diaudit oleh

lembaga pengawasan seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau auditor independen lainnya, untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara tepat dan tidak ada praktik penyalahgunaan.

6. Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya

Dengan adanya sistem akuntansi sektor publik, pemerintah dapat mengelola sumber daya secara lebih efisien dan efektif. Akuntansi membantu dalam mengukur kinerja program, mengevaluasi efisiensi penggunaan anggaran, serta mengidentifikasi area di mana peningkatan kinerja atau penghematan anggaran bisa dilakukan.

7. Penyediaan Informasi untuk Penilaian Kinerja

Selain menyediakan informasi tentang penggunaan dana publik, akuntansi sektor publik juga memberikan data yang diperlukan untuk menilai kinerja program dan aktivitas pemerintah. Ini membantu para pemangku kepentingan menilai apakah program yang dilaksanakan mencapai tujuan yang diinginkan dan apakah sumber daya digunakan secara produktif.

8. Memenuhi Kewajiban Hukum dan Regulasi

Akuntansi sektor publik juga memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan publik. Pemerintah dan lembaga nirlaba diwajibkan oleh hukum untuk menyediakan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang

berlaku, seperti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Indonesia.

9. Mencegah Korupsi dan Penyalahgunaan Dana

Dengan transparansi dan akuntabilitas yang dihasilkan dari praktik akuntansi yang baik, potensi untuk terjadinya korupsi atau penyalahgunaan dana publik dapat dikurangi. Sistem akuntansi yang jelas dan akurat memastikan bahwa setiap transaksi keuangan dapat dilacak, sehingga meminimalkan risiko penyalahgunaan.

10. Memfasilitasi Evaluasi Kebijakan Publik.

Data keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi sektor publik membantu dalam mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan kebijakan publik. Dengan demikian, para pembuat kebijakan dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memperbaiki atau menghentikan kebijakan yang tidak efektif, serta mendukung program yang memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, peran akuntansi sektor publik sangat penting dalam menjaga tata kelola yang baik (*good governance*), memberikan kepercayaan kepada masyarakat, dan memastikan bahwa dana publik dikelola secara bertanggung jawab.

Akuntansi sektor publik adalah cabang akuntansi yang berfokus pada pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan transaksi keuangan yang dilakukan oleh entitas pemerintahan atau organisasi nirlaba yang bertujuan untuk melayani masyarakat. Berbeda dengan akuntansi sektor swasta yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan, akuntansi sektor

publik lebih menekankan pada pemanfaatan sumber daya publik secara efisien, transparansi, dan akuntabilitas.

Berikut adalah beberapa ciri utama dari akuntansi sektor publik:

1. Tujuan: Akuntansi sektor publik bertujuan untuk melaporkan bagaimana dana publik digunakan dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas adalah tujuan utama, agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana uang mereka dikelola dan digunakan oleh pemerintah atau lembaga non-profit.
2. Entitas: Entitas yang menggunakan akuntansi sektor publik meliputi instansi pemerintahan (seperti kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah), lembaga nirlaba, yayasan, rumah sakit pemerintah, dan universitas negeri.
3. Standar Akuntansi: Di banyak negara, akuntansi sektor publik mengikuti standar yang berbeda dari sektor swasta. Di Indonesia, misalnya, digunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mengacu pada International Public Sector Accounting Standards (IPSAS).
4. Basis Akuntansi: Akuntansi sektor publik dapat menggunakan beberapa jenis basis pencatatan, antara lain:
 - a. Basis Akrua: Pendapatan dan belanja dicatat saat terjadi, meskipun kas belum diterima atau dibayarkan.
 - b. Basis Kas: Pendapatan dan belanja hanya dicatat saat kas benar-benar diterima atau dibayarkan.
 - c. Basis Kas Menuju Akrua: Perpaduan antara basis kas dan akrua.

5. Penganggaran: Penganggaran dalam sektor publik adalah salah satu elemen terpenting. Proses penyusunan anggaran di sektor publik umumnya melibatkan perencanaan yang komprehensif dan persetujuan dari legislatif. Pelaporan kinerja anggaran juga harus dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas penggunaan dana.
6. Transparansi dan Akuntabilitas: Pemerintah wajib menyediakan laporan keuangan yang transparan, dapat diakses publik, dan mudah dipahami. Prinsip akuntabilitas menuntut entitas sektor publik untuk bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan yang dilakukan.
7. Laporan Keuangan: Laporan keuangan di sektor publik umumnya terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA): Menunjukkan perbandingan antara anggaran yang dianggarkan dengan realisasinya.
 - b. Laporan Operasional (LO): Menunjukkan aktivitas operasional selama satu periode.
 - c. Neraca: Menunjukkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah pada akhir periode.
 - d. Laporan Arus Kas: Menyajikan aliran kas masuk dan keluar selama satu periode.
8. Pengawasan dan Audit: Pengelolaan keuangan sektor publik diawasi secara ketat oleh lembaga audit internal maupun eksternal, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Indonesia, untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan.

Secara umum, akuntansi sektor publik membantu memastikan bahwa dana masyarakat dikelola secara efektif dan efisien, serta bahwa pemerintah atau organisasi publik dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan keuangannya.

1.4 Keterkaitan Keuangan Negara dan Daerah dengan ASP

Keterkaitan antara keuangan negara dan daerah dengan akuntansi sektor publik sangat erat karena akuntansi sektor publik berfungsi sebagai alat untuk mencatat, mengelola, dan melaporkan transaksi keuangan yang terjadi dalam pemerintahan di tingkat pusat (nasional) dan daerah (provinsi, kota, kabupaten), Halim (2013). Berikut adalah beberapa poin penting mengenai keterkaitan tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Pengelolaan Dana Publik

Keuangan negara dan daerah mencakup seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah, yang bersumber dari pajak, retribusi, hibah, pinjaman, atau sumber pendapatan lainnya. Akuntansi sektor publik digunakan untuk mencatat dan mengelola arus keuangan tersebut, sehingga setiap transaksi yang terjadi dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah dapat teridentifikasi dengan jelas.

- a. Keuangan Negara: Akuntansi sektor publik di tingkat nasional bertanggung jawab mencatat anggaran, pelaksanaan, dan pelaporan terkait APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

- b. Keuangan Daerah: Di tingkat daerah, akuntansi sektor publik digunakan untuk mencatat pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), termasuk penerimaan daerah (misalnya dari pajak daerah, retribusi) dan pengeluarannya.

2. Alokasi dan Distribusi Dana Pusat ke Daerah

Akuntansi sektor publik memainkan peran penting dalam mengelola transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Proses transfer ini dicatat dengan cermat dalam sistem akuntansi untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan tepat jumlah dan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

- a. Dana Transfer: Akuntansi sektor publik memastikan pencatatan transfer dana dari pusat ke daerah dilakukan secara akurat dan transparan, sehingga setiap pihak dapat melacak jumlah dana yang diterima dan bagaimana dana tersebut digunakan.
- b. Pengawasan dan Akuntabilitas: Dengan sistem akuntansi yang baik, daerah bertanggung jawab untuk menyusun laporan penggunaan dana yang diperoleh dari pusat, dan melaporkannya kepada pemerintah pusat serta lembaga pengawas.

3. Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran (APBN dan APBD)

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bergantung pada data keuangan yang dihasilkan

oleh sistem akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik memberikan informasi yang relevan mengenai pendapatan yang diperkirakan dan pengeluaran yang direncanakan, sehingga membantu pemerintah dalam merencanakan pengalokasian sumber daya publik.

- a. APBN (Tingkat Nasional): Akuntansi sektor publik di tingkat pusat berperan dalam mencatat dan melaporkan anggaran dan pelaksanaan APBN, termasuk semua pendapatan negara, belanja pemerintah pusat, dan pembiayaan.
- b. APBD (Tingkat Daerah): Di tingkat daerah, akuntansi sektor publik digunakan untuk mengelola dan melaporkan APBD yang disusun oleh pemerintah daerah dan disetujui oleh DPRD. Ini mencakup anggaran pendapatan dari sumber-sumber lokal dan anggaran belanja untuk pelayanan publik di daerah.

4. Pengendalian dan Pengawasan Keuangan

Akuntansi sektor publik di tingkat nasional dan daerah membantu dalam proses pengendalian dan pengawasan penggunaan dana publik. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi ini memberikan dasar bagi auditor dan badan pengawas (seperti BPK atau Inspektorat Daerah) untuk melakukan audit dan memeriksa apakah dana publik digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- a. Pengawasan Keuangan Pusat: Di tingkat pusat, laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan bahwa

pelaksanaan APBN sesuai dengan ketentuan dan akuntabel.

- b. Pengawasan Keuangan Daerah: Di tingkat daerah, BPK juga mengaudit laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) untuk memastikan bahwa penggunaan APBD dilakukan secara efektif dan sesuai dengan aturan.

5. Pelaporan Keuangan Negara dan Daerah

Akuntansi sektor publik berperan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Laporan-laporan ini mencakup informasi mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan pembiayaan, yang sangat penting untuk transparansi dan akuntabilitas publik.

- a. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP): Disusun oleh pemerintah pusat dan mencakup seluruh transaksi keuangan yang terkait dengan APBN. LKPP disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah yang berlaku dan disajikan kepada masyarakat untuk penilaian kinerja keuangan nasional.
- b. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD): Disusun oleh pemerintah daerah dan mencerminkan pelaksanaan APBD. Laporan ini juga diaudit oleh BPK untuk memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

6. Kebijakan Fiskal dan Perencanaan Keuangan

Akuntansi sektor publik memberikan data penting bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal. Informasi keuangan dari laporan akuntansi digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan

pemerintah dan merencanakan alokasi sumber daya di masa depan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

- a. Kebijakan Fiskal Nasional: Pemerintah pusat menggunakan data dari laporan keuangan publik untuk merumuskan kebijakan fiskal, seperti kebijakan pajak, pengeluaran, dan pembiayaan. Ini juga membantu dalam perencanaan pembangunan nasional yang lebih luas.
- b. Kebijakan Fiskal Daerah: Pemerintah daerah menggunakan data dari laporan keuangan daerah untuk menentukan prioritas anggaran dan program-program pembangunan lokal yang lebih spesifik.

7. Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Akuntansi sektor publik membantu menciptakan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal pengelolaan keuangan. Melalui sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi, pemerintah pusat dan daerah dapat berkolaborasi dalam merencanakan dan mengawasi penggunaan anggaran secara keseluruhan untuk kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, akuntansi sektor publik menjadi landasan penting dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah, karena membantu memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien, transparan, dan bertanggung jawab baik di tingkat pusat maupun daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul. 2013. Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi, Penerbit Salemba Empat Jakarta.
- Jones, P., and Bates, J., 1990. Public Sektor Auditing. London: Chapman and Hall.
- Jones, Rowan and Pendlebury, Maurice. 1996. Public Sector Accounting, 4th Ed., London: Pitman Publishing.
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Edisi IV. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga. Yogyakarta.
- Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UII Press
- Haryanto, dkk. 2014. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Pertama. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.

BAB 2

RUANG LINGKUP DAN KARAKTERISTIK AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Oleh: Margie Christanty Poluan, S.E., M.S.A.

2.1 Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Selama lebih dari setengah abad, peran sektor publik dalam berbagai bentuknya, terutama melalui keberadaan institusi pemerintahan serta berbagai aktivitas dan kebijakan yang dijalankan, telah terbukti menjadi fondasi utama yang menopang struktur perekonomian nasional. Pemerintah, melalui fungsi-fungsinya dalam pengaturan, pelayanan, distribusi, dan stabilisasi, memainkan peran sentral dalam mengarahkan pembangunan ekonomi dan sosial bangsa. Dengan kontribusi yang begitu signifikan, maka membatasi pembahasan mengenai akuntansi sektor publik hanya pada ranah pemerintahan tanpa mengakomodasi elemen sektor publik lainnya akan menyebabkan kekosongan dalam kerangka pengaturan dan praktik akuntansi secara menyeluruh di sektor ini. Oleh karena itu, langkah strategis yang perlu segera diambil adalah melakukan penataan ulang terhadap sistem akuntansi sektor publik. Upaya ini harus dimulai dari penyusunan definisi dan kesepakatan bersama mengenai ruang lingkup akuntansi sektor publik yang bersifat inklusif dan mencerminkan kompleksitas aktor-aktor di dalamnya (www.dosenpendidikan.co.id/akuntansi-sektor-publik).

Akuntansi sektor publik sendiri merupakan cabang dari ilmu akuntansi yang secara khusus diterapkan dalam konteks entitas non-komersial atau non-profit, yaitu organisasi yang tujuan utamanya bukan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ruang lingkup entitas dalam sektor ini sangat luas, mencakup lembaga-lembaga tinggi negara seperti lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif beserta seluruh kementerian dan lembaga teknis di bawahnya, pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, serta berbagai organisasi non-pemerintah seperti yayasan sosial, partai politik, lembaga pendidikan tinggi, dan organisasi nirlaba lainnya.

Salah satu karakteristik utama dari organisasi sektor publik adalah penggunaan dana yang berasal dari publik, baik berupa pajak, sumbangan, hibah, maupun bentuk kontribusi lainnya. Oleh karena itu, organisasi-organisasi ini memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai pemberi dana. Dalam kerangka ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip dasar yang mendasari penyelenggaraan akuntansi sektor publik.

Meskipun dalam praktiknya beberapa entitas sektor publik mengadopsi pendekatan-pendekatan manajerial yang lazim ditemukan di sektor swasta, seperti efisiensi biaya dan pendekatan pasar, namun hal tersebut tidak berarti bahwa organisasi sektor publik akan mengalami transformasi menjadi entitas komersial. Sebaliknya, pendekatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik tanpa

menghilangkan esensi dari fungsi sosial mereka. Di Indonesia, sebagaimana dijelaskan oleh Bastian (2006), praktik akuntansi sektor publik mencakup sejumlah bidang penting, yang antara lain meliputi pengelolaan keuangan negara, penyusunan dan pelaporan anggaran, sistem akuntansi pemerintahan, serta mekanisme pertanggungjawaban publik yang berkaitan erat dengan prinsip good governance.

1. Akuntansi Pemerintah Pusat.
2. Akuntansi Pemerintah Daerah.
3. Akuntansi Parpol dan LSM.
4. Akuntansi Yayasan.
5. Akuntansi Pendidikan dan Kesehatan puskesmas, rumah sakit, dan sekolah.
6. Akuntansi Tempat peribadatan.
7. Akuntansi kesehatan: puskesmas atau rumah sakit
8. Akuntansi tempat peribadatan: masjid, gereja, wihara, atau pura.

Menurut Bastian (2006), setelah melakukan kajian mendalam terhadap topik-topik sebelumnya yang berkaitan dengan dinamika dan peran akuntansi dalam ranah publik, kini saat yang tepat untuk mengintensifkan pemahaman atas urgensi serta peranan strategis akuntansi sektor publik yang dewasa ini semakin menonjol dalam konteks tata kelola organisasi negara. Pemahaman yang lebih luas mengenai dimensi akuntansi ini sangat penting, terutama dalam konteks pendidikan tinggi, di mana selama ini topik akuntansi sektor publik seringkali belum memperoleh porsi perhatian yang memadai dibandingkan dengan akuntansi sektor swasta.

Pada awalnya, wacana mengenai akuntansi sektor publik cenderung disederhanakan hanya dalam kerangka "akuntansi pemerintahan", suatu penyempitan konseptual yang tidak sepenuhnya mencerminkan luasnya cakupan dan kompleksitas praktik akuntansi di sektor publik. Penyeragaman istilah ini bisa dimaklumi, mengingat latar belakang sejarah pendidikan akuntansi di Indonesia pada era 1970-an yang banyak mengadopsi pendekatan Amerika Serikat.

Negara tersebut menganut sistem ekonomi pasar bebas, yang secara inheren menekankan dominasi sektor swasta dan meminimalkan intervensi negara dalam kegiatan ekonomi. Akibat dari pendekatan tersebut, akuntansi yang berkembang di Indonesia kala itu lebih terfokus pada pengelolaan keuangan korporasi, sedangkan aspek publik dikesampingkan.

Lebih lanjut, Bastian (2006) menegaskan bahwa secara praktis, peran pemerintah pada waktu itu sangat dibatasi dalam hal inisiasi dan implementasi program-program publik, termasuk dalam ruang gerak institusi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. Kebijakan pembatasan ini kemudian berdampak pada kurang berkembangnya praktik akuntansi sektor publik, karena ruang lingkupnya hanya dianggap relevan di lembaga pemerintahan semata, padahal sebenarnya akuntansi sektor publik mencakup entitas yang jauh lebih luas.

Di tengah berkembangnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan sumber daya publik yang efisien, organisasi sektor publik kini

dihadapkan pada tekanan yang semakin kompleks.

Mereka dituntut untuk tidak hanya menjalankan fungsi layanan publik secara efektif, tetapi juga mempertimbangkan biaya ekonomi dan sosial serta dampak jangka panjang dari aktivitas yang dilakukan. Dalam situasi ini, akuntansi menjadi instrumen penting dan semakin diakui sebagai ilmu manajerial yang krusial dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan pengawasan terhadap aktivitas sektor publik.

Secara konseptual, sektor publik dapat didefinisikan sebagai sistem birokrasi serta entitas ekonomi yang berada di bawah otoritas negara dan berperan dalam memenuhi kewajiban konstitusional pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat. Fungsi utama sektor publik antara lain mencakup:

1. Alokasi sumber daya ekonomi yang terbatas secara optimal demi kepentingan publik;
2. Pengendalian terhadap stabilitas ekonomi makro seperti inflasi dan pengangguran;
3. Redistribusi pendapatan guna mengurangi kesenjangan sosial; dan
4. Penyediaan barang dan jasa publik yang tidak mungkin disediakan oleh mekanisme pasar secara efisien.

Organisasi yang termasuk dalam sektor publik memiliki sejumlah karakteristik khas yang membedakannya dari organisasi sektor swasta. Karakteristik tersebut antara lain: tidak berorientasi pada pencapaian keuntungan finansial; kepemilikannya bersifat kolektif oleh seluruh masyarakat; sumber dayanya tidak dinyatakan dalam bentuk

saham yang dapat diperdagangkan; serta pengambilan keputusan didasarkan pada proses musyawarah dan konsensus, bukan berdasarkan kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Seiring dengan berkembangnya prinsip *good public governance*, organisasi sektor publik dituntut untuk memenuhi standar yang lebih tinggi dalam hal akuntabilitas dan transparansi.

Selama ini, sektor publik sering kali diasosiasikan dengan inefisiensi, pemborosan anggaran, dan kinerja yang kurang transparan. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk mereformasi sistem akuntansi sektor publik agar dapat mendukung prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, dan nilai guna tertinggi (*value for money*). Dorongan untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan publik yang lebih modern, responsif, dan akuntabel ini menjadi salah satu motor penggerak dalam pengembangan ilmu akuntansi sektor publik, khususnya di lingkungan pemerintahan Indonesia.

2.2 Negara dan pemerintah sebagai sasaran

Akuntansi Sektor Publik

Negara dan pemerintah adalah sasaran utama dari akuntansi sektor publik karena keduanya merupakan entitas yang bertanggung jawab dalam mengelola dan mendistribusikan sumber daya publik untuk kepentingan masyarakat. Akuntansi sektor publik berperan dalam memastikan bahwa penggunaan keuangan negara oleh pemerintah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan

sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan publik. Berikut penjelasan mengenai hubungan antara negara, pemerintah, dan akuntansi sektor publik:

1. Negara sebagai Pemilik Sumber Daya Publik.

Negara adalah pemilik dari sumber daya publik yang dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Sumber daya ini bisa berasal dari berbagai sumber, seperti pajak, hasil alam, pinjaman, hibah, serta pendapatan lainnya yang menjadi milik publik. Dalam konteks akuntansi sektor publik, negara diwakili oleh berbagai lembaga pemerintahan yang diberi kewenangan untuk mengelola dana tersebut secara sah.

2. Pemerintah sebagai Pengelola Keuangan Negara.

Pemerintah, sebagai pelaksana kebijakan negara, menjadi aktor utama dalam pengelolaan keuangan negara. Semua kegiatan pemerintah yang terkait dengan penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan harus dicatat dan dilaporkan sesuai dengan standar akuntansi sektor publik. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien dan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan melalui anggaran.

3. Peran Akuntansi Sektor Publik dalam Negara dan Pemerintah.

Akuntansi sektor publik memainkan peran vital dalam menciptakan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik oleh pemerintah. Peran akuntansi sektor publik dalam konteks negara dan pemerintah meliputi:

- a. Pengelolaan Anggaran Negara (APBN/APBD): Akuntansi sektor publik digunakan untuk mencatat dan melaporkan pelaksanaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) di tingkat pusat dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) di tingkat daerah. Proses ini melibatkan pencatatan penerimaan (misalnya dari pajak atau sumber daya alam) dan pengeluaran (misalnya untuk layanan publik atau pembangunan infrastruktur).
- b. Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah: Akuntansi sektor publik memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab kepada masyarakat atas penggunaan keuangan negara. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah diaudit secara berkala untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan dana publik.
- c. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah: Pemerintah wajib menyusun laporan keuangan sebagai hasil dari sistem akuntansi yang digunakan, baik di tingkat pusat (misalnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/LKPP) maupun di tingkat daerah (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah/LKPD). Laporan ini mencakup informasi tentang pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan surplus/defisit anggaran.
- d. Kebijakan Fiskal dan Perencanaan Keuangan: Akuntansi sektor publik memberikan data yang diperlukan untuk pengambilan keputusan kebijakan fiskal dan perencanaan keuangan negara. Informasi yang disajikan oleh akuntansi ini digunakan oleh pemerintah untuk menentukan kebijakan pengeluaran dan pendapatan

negara, seperti perencanaan pajak, pinjaman, atau subsidi.

4. Pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Negara

Negara dan pemerintah harus memastikan bahwa semua sumber daya publik dikelola dengan baik sesuai dengan prinsip good governance (tata kelola yang baik). Akuntansi sektor publik mendukung proses pengawasan ini dengan menyajikan laporan keuangan yang dapat diaudit oleh lembaga pengawas, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Indonesia.

- a. Audit Keuangan: Laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah diaudit oleh BPK untuk memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang telah disetujui, dan tidak terjadi penyalahgunaan atau korupsi.
- b. Pengawasan Legislatif: Lembaga legislatif (seperti DPR di tingkat pusat dan DPRD di tingkat daerah) menggunakan laporan keuangan untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh pemerintah. Hal ini membantu memastikan bahwa pemerintah menjalankan mandatnya secara akuntabel.

5. Sarana Transparansi bagi Masyarakat

Akuntansi sektor publik berfungsi sebagai alat transparansi untuk masyarakat, yang memungkinkan warga negara untuk mengetahui bagaimana dana publik dikelola dan digunakan oleh pemerintah. Laporan keuangan publik yang disusun berdasarkan standar akuntansi sektor publik harus disajikan kepada masyarakat secara terbuka.

6. Pencegahan Korupsi dan Penyalahgunaan Dana

Salah satu tujuan utama dari penerapan akuntansi sektor publik adalah untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan dana publik. Sistem pencatatan yang baik dan transparan memungkinkan pemerintah, masyarakat, serta lembaga pengawas untuk melacak setiap transaksi keuangan dan memastikan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan dana negara.

- a. Pengendalian Internal: Akuntansi sektor publik membantu pemerintah dalam menerapkan sistem pengendalian internal yang baik, sehingga setiap transaksi harus melewati proses pencatatan dan persetujuan yang jelas.
- b. Pengungkapan yang Jelas: Setiap pengeluaran atau pendapatan yang melibatkan keuangan publik harus diungkapkan secara jelas dalam laporan keuangan, sehingga mengurangi peluang terjadinya kecurangan atau manipulasi.

Negara dan pemerintah sebagai sasaran utama akuntansi sektor publik mencerminkan pentingnya sistem akuntansi yang transparan, akuntabel, dan efisien untuk memastikan pengelolaan keuangan publik yang baik. Akuntansi sektor publik memungkinkan negara dan pemerintah untuk mencatat, mengelola, dan melaporkan sumber daya publik dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta meminimalkan korupsi dan penyalahgunaan dana.

2.3 Ruang Lingkup Keuangan Negara

Ruang lingkup keuangan negara mencakup segala hal yang berhubungan dengan penerimaan, pengelolaan, pengeluaran, dan pengawasan keuangan oleh negara untuk memenuhi kebutuhan publik dan menjalankan fungsi pemerintahan. Dalam konteks ini, keuangan negara diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan kerangka kerja bagi bagaimana negara mengelola dan mempertanggungjawabkan sumber daya keuangannya. Berikut adalah beberapa aspek penting yang termasuk dalam ruang lingkup keuangan negara:

1. Pendapatan Negara

Pendapatan negara mencakup seluruh penerimaan yang diperoleh negara dari berbagai sumber yang sah. Pendapatan ini digunakan untuk mendanai berbagai program dan layanan publik yang dijalankan oleh pemerintah. Beberapa sumber pendapatan negara adalah:

- a. Pajak: Pajak adalah sumber utama pendapatan negara yang meliputi pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea masuk, cukai, dan lainnya.
- b. Retribusi: Negara juga memperoleh pendapatan dari retribusi atas layanan yang diberikan oleh pemerintah, seperti pelayanan publik tertentu.
- c. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): PNBP termasuk pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan alam, dividen dari BUMN, penerimaan dari penjualan aset, dan lainnya.

- d. Pinjaman: Negara bisa memperoleh pendapatan dari pinjaman, baik domestik maupun luar negeri, untuk mendanai program atau proyek tertentu.
- e. Hibah: Hibah dari lembaga internasional atau negara lain juga menjadi salah satu sumber pendapatan negara.

2. Pengeluaran Negara

Pengeluaran negara adalah belanja yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan publik, menjalankan program pemerintah, serta membiayai operasional pemerintahan. Pengeluaran ini mencakup:

- a. Belanja Pemerintah Pusat: Ini mencakup pengeluaran untuk kementerian, lembaga, dan badan pemerintahan yang menjalankan program-program di tingkat nasional. Pengeluaran ini mencakup pengeluaran rutin (gaji pegawai, operasional pemerintah) serta pengeluaran untuk proyek pembangunan.
- b. Belanja Transfer ke Daerah: Negara melakukan transfer dana ke pemerintah daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa, serta Dana Bagi Hasil (DBH) untuk mendanai program di tingkat lokal.
- c. Belanja untuk Pembiayaan Utang: Pengeluaran negara juga mencakup pembayaran bunga dan pokok utang yang telah diambil untuk membiayai berbagai program.

3. Pengelolaan Anggaran Negara (APBN dan APBD)

Pengelolaan keuangan negara berkaitan erat dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tingkat nasional dan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) di tingkat daerah. Pengelolaan ini meliputi:

- a. Penyusunan Anggaran: Proses penyusunan APBN dan APBD di mana pemerintah merencanakan penerimaan dan pengeluaran untuk satu tahun anggaran berdasarkan prioritas pembangunan dan kebijakan fiskal.
- b. Pelaksanaan Anggaran: Proses implementasi anggaran setelah disetujui oleh legislatif, termasuk pelaksanaan berbagai program yang telah dialokasikan anggarannya.
- c. Pengawasan dan Pengendalian: Lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan inspektorat bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan anggaran dan memastikan dana digunakan sesuai dengan perencanaan.

4. Pembiayaan

Pembiayaan dalam keuangan negara mencakup kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan utang negara, investasi, dan pengelolaan aset negara. Pembiayaan terdiri dari:

- a. Pembiayaan Utang: Pemerintah dapat menggunakan utang untuk menutup defisit anggaran. Utang ini dapat bersumber dari pinjaman dalam negeri, luar negeri, atau penerbitan surat utang negara (obligasi).
- b. Pembiayaan Investasi: Pemerintah juga dapat melakukan investasi dalam proyek-proyek jangka panjang yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi.
- c. Pengelolaan Aset Negara: Ini meliputi manajemen aset yang dimiliki oleh negara, baik yang berwujud (seperti

tanah dan bangunan) maupun tidak berwujud (seperti hak atas sumber daya alam), agar memberikan manfaat yang optimal.

5. Pengelolaan Kekayaan Negara

Pengelolaan kekayaan negara mengacu pada pengelolaan aset yang dimiliki negara. Kekayaan negara dapat berupa aset tetap (seperti gedung, jalan, dan jembatan), kekayaan alam (seperti minyak, gas, tambang), serta investasi negara dalam perusahaan-perusahaan (misalnya BUMN). Ruang lingkup ini meliputi:

- a. Pengelolaan Sumber Daya Alam: Kekayaan alam negara seperti minyak, gas, mineral, dan hasil hutan dikelola oleh negara, baik melalui eksplorasi langsung atau kemitraan dengan sektor swasta.
- b. Investasi dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN): Negara berinvestasi dalam perusahaan-perusahaan milik negara yang berperan penting dalam perekonomian nasional. Pendapatan dari BUMN dapat berupa dividen, sementara aset BUMN juga merupakan bagian dari kekayaan negara.

6. Pinjaman dan Utang Negara

Keuangan negara juga mencakup pengelolaan pinjaman dan utang yang diambil oleh pemerintah untuk membiayai program pembangunan atau menutup defisit anggaran. Utang negara dapat bersumber dari:

- a. Pinjaman Dalam Negeri: Utang yang diperoleh dari pihak-pihak domestik melalui penerbitan obligasi atau pinjaman dari lembaga keuangan domestik.

- b. Pinjaman Luar Negeri: Utang yang diperoleh dari negara lain atau lembaga internasional seperti Bank Dunia, IMF, atau lembaga-lembaga donor lainnya.

7. Pengawasan dan Akuntabilitas

Pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan dan akuntabilitas keuangan negara dilakukan melalui beberapa mekanisme, di antaranya:

- a. Pengawasan Internal: Dilakukan oleh lembaga atau inspektorat internal di masing-masing kementerian atau lembaga untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan pengelolaan keuangan.
- b. Pengawasan Eksternal: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berperan dalam mengaudit laporan keuangan pemerintah dan memastikan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum.
- c. Akuntabilitas Publik: Pemerintah wajib melaporkan pelaksanaan anggaran dan hasil-hasil pembangunan kepada masyarakat melalui laporan keuangan yang transparan dan audit yang independen.

8. Kebijakan Fiskal

Ruang lingkup keuangan negara mencakup kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara. Kebijakan fiskal ini meliputi:

- a. Kebijakan Pajak: Pemerintah menentukan kebijakan pajak yang bertujuan untuk mengumpulkan pendapatan guna membiayai pengeluaran negara.

- b. Kebijakan Pengeluaran: Kebijakan ini mencakup keputusan terkait alokasi anggaran untuk berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan lainnya.
- c. Kebijakan Defisit atau Surplus: Pemerintah dapat memutuskan apakah akan menjalankan kebijakan anggaran berimbang, surplus, atau defisit, tergantung pada kondisi ekonomi dan prioritas pembangunan.

9. Laporan Keuangan Negara

Ruang lingkup keuangan negara juga mencakup penyusunan laporan keuangan negara yang meliputi seluruh penerimaan dan pengeluaran negara. Laporan keuangan ini disusun untuk memberikan gambaran transparan tentang kondisi keuangan negara, dan biasanya meliputi:

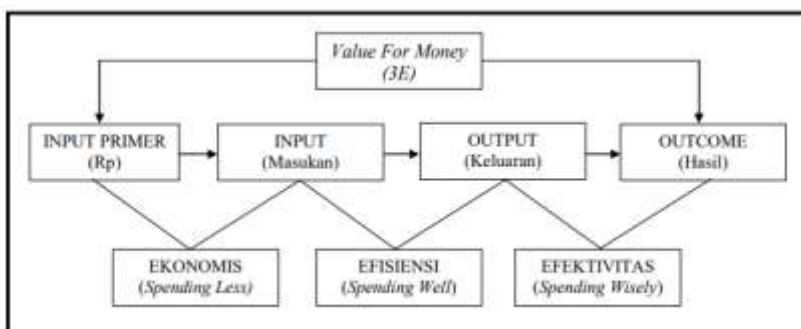
- a. Laporan Realisasi Anggaran: Menunjukkan pendapatan dan pengeluaran negara dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan.
- b. Neraca: Mencerminkan posisi keuangan pemerintah, termasuk aset, kewajiban, dan ekuitas negara.
- c. Laporan Arus Kas: Menyajikan arus kas masuk dan keluar dari aktivitas operasional, investasi, dan pembiayaan pemerintah.

Ruang lingkup keuangan negara mencakup seluruh aspek yang terkait dengan perencanaan, penerimaan, pengelolaan, pengeluaran, pembiayaan, dan pengawasan keuangan oleh pemerintah. Ini mencakup pendapatan negara dari berbagai sumber, pengeluaran untuk program-program publik, pengelolaan utang, serta pengawasan yang ketat

terhadap penggunaan dana publik. Keuangan negara harus dikelola secara transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien dan sesuai dengan kepentingan masyarakat.

2.4 Value For Money

Konsep *value for money* didasarkan pada tiga elemen utama. Konsep *value for money* atau yang dikenal dengan 3E yaitu Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas. Gambar skema *value for money* menurut Mardiasmo (2002), yaitu sebagai berikut:



Gambar 2.1 Skema *Value for Money*

1. INPUT (masukan)

Dalam konteks pengelolaan program dan kebijakan publik, *input* merujuk pada seluruh sumber daya yang secara langsung maupun tidak langsung digunakan sebagai masukan untuk menjalankan suatu kegiatan, program, atau kebijakan publik. Sumber daya ini mencakup baik aspek fisik, manusia, maupun keuangan yang diperlukan agar pelaksanaan aktivitas dapat berlangsung secara

efektif. Misalnya, keberadaan tenaga medis seperti dokter dalam sistem pelayanan rumah sakit, penyediaan lahan dalam proyek pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, atau keberadaan tenaga pengajar dalam institusi pendidikan formal seperti sekolah merupakan contoh konkret dari bentuk-bentuk input.

Input dapat diukur dan dinyatakan dalam dua dimensi utama, yaitu secara kuantitatif dan secara moneter. Pengukuran secara kuantitatif mencakup hal-hal seperti jumlah personel (misalnya jumlah dokter atau guru), luas lahan yang disediakan, serta jumlah alat atau sarana pendukung lainnya. Sementara itu, dari sisi nilai ekonomi, input dapat dinyatakan dalam bentuk satuan mata uang, misalnya besaran gaji untuk tenaga kerja, nilai pembelian tanah, atau total biaya pengadaan barang dan jasa. Dalam kerangka evaluasi kinerja sektor publik, identifikasi dan pengukuran input menjadi tahapan awal yang esensial karena menentukan efisiensi pelaksanaan program.

2. OUTPUT (keluaran)

Output mengacu pada hasil langsung yang diperoleh dari pelaksanaan suatu kegiatan, kebijakan, atau program publik. Hasil ini biasanya merupakan produk atau dampak nyata yang dapat diamati sebagai konsekuensi dari penggunaan input yang telah dialokasikan sebelumnya. Dalam praktik manajemen kinerja, output seringkali difokuskan pada hasil-hasil yang diinginkan (*desired outcomes*), sementara efek samping atau hasil tak diharapkan (*unintended outcomes*) kerap kali diabaikan. Misalnya, pembangunan jalan baru menghasilkan output

berupa infrastruktur fisik yang lebih baik, namun juga bisa menimbulkan dampak negatif seperti peningkatan polusi udara, yang sering kali tidak masuk dalam laporan evaluatif.

Mengukur output menjadi tantangan tersendiri, khususnya dalam konteks pelayanan sosial yang memiliki karakteristik intangible (tidak berwujud) seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Misalnya, peran kepolisian dalam menegakkan hukum dan menciptakan rasa aman di masyarakat merupakan bentuk output yang substansial, tetapi sulit untuk diukur secara langsung. Penurunan angka kriminalitas dapat dijadikan indikator proksi dari kinerja aparat penegak hukum, namun indikator ini bersifat tidak absolut karena bisa dipengaruhi oleh banyak variabel lain seperti kualitas pendidikan, kondisi sosial-ekonomi, atau bahkan partisipasi masyarakat.

3. PROSES (Sasaran Antara)

Dalam kerangka evaluasi berbasis *Value for Money* (VfM), terdapat kebutuhan mendesak untuk menyusun dan menganalisis data input dan output secara akurat. Akan tetapi, dalam banyak kasus, data output yang bersifat komprehensif dan representatif sering kali tidak tersedia atau sulit diukur, terutama dalam layanan publik yang berdimensi sosial. Oleh karena itu, untuk mengatasi keterbatasan ini, digunakanlah konsep *sasaran antara* atau *throughput*, yang juga dikenal sebagai *intermediate outputs* atau *indikator kinerja*. Indikator-indikator ini berfungsi sebagai representasi kinerja jangka menengah dan memberikan gambaran tentang arah dan kemajuan

dari tujuan akhir organisasi. Contohnya adalah peningkatan derajat kesehatan masyarakat atau bertambahnya angka harapan hidup yang menunjukkan adanya perbaikan kualitas layanan kesehatan meskipun output akhir seperti penurunan angka kematian belum sepenuhnya tercapai.

Penerapan prinsip *Value for Money* menekankan pentingnya pencapaian hasil yang optimal dengan meminimalkan biaya masukan. Dengan kata lain, suatu organisasi dinilai berhasil jika mampu mengelola sumber daya (input) secara efisien untuk menghasilkan keluaran (output) yang bernilai tinggi, baik dalam aspek kualitas layanan maupun dampaknya terhadap masyarakat. Prinsip ini menjadi tolok ukur penting dalam memastikan bahwa belanja publik memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umum, dan bukan sekadar pengeluaran administratif tanpa hasil nyata.

4. *OUTCOME* (Dampak) dalam Evaluasi Kinerja Sektor Publik

Dalam kerangka evaluasi kebijakan dan program publik, *outcome* atau *dampak* merujuk pada konsekuensi jangka menengah hingga panjang dari suatu aktivitas, kebijakan, atau program yang telah dijalankan. Outcome merupakan hasil akhir yang mencerminkan tingkat pencapaian terhadap tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Sebagai contoh, pengumpulan dan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh dinas kebersihan dapat menghasilkan lingkungan perkotaan yang lebih bersih dan sehat. Dampak semacam ini bukan hanya

menjadi refleksi keberhasilan operasional, tetapi juga menjadi indikator substansial bagi efektivitas program yang dijalankan.

Namun demikian, dalam implementasi praktisnya, pengukuran terhadap outcome sering kali menemui kendala yang cukup kompleks. Beberapa hambatan utama antara lain:

- a. Kesulitan dalam proses monitoring, yang umumnya disebabkan oleh tidak tersedianya indikator outcome yang terformulasi secara jelas, sederhana, dan terukur.
- b. Kendala politik dalam proses perumusan hasil, karena penetapan prioritas dan definisi outcome sangat bergantung pada pemegang otoritas atau kekuasaan yang dominan, yang sering kali membawa kepentingan subjektif.
- c. Rendahnya kualitas target outcome itu sendiri, yang dapat terjadi karena penyusunan indikator yang kurang mencerminkan realitas atau karena keterbatasan kapasitas teknis perumus kebijakan.

Oleh karena itu, pengelolaan dan evaluasi outcome memerlukan pendekatan analitis yang terstruktur dan berbasis data, agar hasil yang diperoleh benar-benar mencerminkan keberhasilan suatu program dalam menjawab kebutuhan publik secara substansial.

2.4.1 Konsep Value for Money (VfM) dalam Pengelolaan Keuangan Publik

Value for Money (VfM) adalah suatu konsep dalam pengelolaan dan pengukuran kinerja sektor publik yang

menekankan pada optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang terbatas guna mencapai keluaran (output) dan dampak (outcome) yang maksimal. Dalam konteks manajemen publik modern, VfM menjadi prinsip utama dalam menjamin bahwa anggaran yang digunakan oleh lembaga pemerintah benar-benar memberikan nilai yang setimpal bagi masyarakat luas.

Penerapan prinsip VfM semakin penting di era sekarang, seiring dengan meningkatnya tuntutan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan praktik *good governance* dalam pengelolaan keuangan negara. Manfaat dari penerapan prinsip ini dalam sektor publik antara lain:

1. Meningkatnya efektivitas dan kualitas layanan publik,
2. Turunnya biaya penyediaan layanan akibat adanya efisiensi dalam penggunaan input,
3. Meningkatnya orientasi pengeluaran anggaran terhadap kepentingan masyarakat,
4. Bertambahnya kesadaran dan tanggung jawab terhadap penggunaan dana publik dalam setiap proses pengambilan keputusan.

2.4.2 Tiga Pilar Utama dalam Konsep Value for Money: Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (kemenkeu.go.id), pencapaian VfM dapat diukur melalui tiga indikator kinerja utama, yaitu:

1. Ekonomi: Mengacu pada kemampuan organisasi sektor publik dalam memperoleh input (sumber daya) dengan biaya serendah mungkin tanpa mengorbankan kualitas. Ini

melibatkan upaya untuk menghindari pemborosan dan penggunaan anggaran yang tidak produktif.

2. Efisiensi: Berkaitan dengan hubungan antara input dan output, yakni seberapa optimal penggunaan input dalam menghasilkan output. Sebuah organisasi dinyatakan efisien apabila mampu memproduksi hasil sebanyak mungkin dengan sumber daya sekecil mungkin.
3. Efektivitas: Menunjukkan sejauh mana hasil (outcome) suatu program atau kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas mencerminkan keberhasilan strategis dari pelaksanaan program, bukan sekadar keberhasilan teknis.

2.4.3 Faktor Pendorong Peningkatan Value for Money dalam Skema PPP

Dalam konteks kemitraan pemerintah dan swasta (Public-Private Partnership/PPP), terdapat tiga faktor utama yang mampu meningkatkan pencapaian VfM:

1. Alokasi Risiko yang Tepat: Dengan mendistribusikan risiko secara proporsional antara sektor publik dan swasta, nilai efisiensi dalam pelaksanaan proyek dapat dimaksimalkan. Risiko-risiko seperti keterlambatan proyek, pembengkakan biaya, atau ketidakpastian pasar dapat dikelola lebih baik oleh pihak yang paling kompeten.
2. Spesifikasi Output yang Jelas: Pihak swasta diyakini memiliki kapasitas dan pengalaman inovatif dalam merancang solusi untuk mencapai spesifikasi output tertentu dengan cara yang lebih hemat biaya. Hal ini

mendorong efisiensi dalam desain dan implementasi proyek.

3. Kontrak Berbasis Kinerja (Performance-Based Contract): Skema ini mendorong pihak swasta untuk mempertahankan standar kualitas layanan selama periode konsesi, bukan hanya fokus pada penyelesaian proyek fisik. Dengan demikian, mekanisme ini memastikan kesinambungan mutu pelayanan dan secara tidak langsung meningkatkan VfM.

2.4.4 Metode Analisis Value for Money

Untuk menganalisis pencapaian VfM secara lebih objektif, terdapat dua pendekatan utama:

1. Metode Kualitatif: Mengandalkan analisis deskriptif dan naratif terhadap aspek-aspek non-finansial yang mencakup potensi manfaat sosial, politik, dan lingkungan dari suatu program.
2. Metode Kuantitatif: Menggunakan pendekatan numerik untuk membandingkan total biaya proyek dalam skema PPP dengan biaya pengadaan konvensional, yang mencakup seluruh biaya dari tahap konstruksi hingga operasional. Analisis ini memberikan gambaran riil tentang seberapa besar penghematan atau efisiensi yang diperoleh dari pelibatan pihak swasta.

2.5 Manfaat Analisis Value for Money

2.5.1 Implementasi Analisis Value for Money dalam Sektor Publik

Penerapan analisis *Value for Money* (VfM) di sektor

publik diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas serta kinerja sektor publik itu sendiri. Dalam konteks pengelolaan sektor publik, penerapan prinsip VfM memiliki berbagai manfaat yang dapat dirasakan oleh organisasi publik, antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Publik: Penerapan prinsip VfM dapat memastikan bahwa pelayanan yang diberikan oleh sektor publik lebih tepat sasaran, sehingga masyarakat yang menjadi penerima manfaat benar-benar merasakan dampak positif dari program yang dijalankan. Efektivitas ini tercapai karena adanya fokus yang jelas terhadap tujuan yang ingin dicapai serta pemilihan sasaran yang lebih spesifik.
2. Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik: Dengan adanya penekanan pada efisiensi dan optimalisasi penggunaan sumber daya, penerapan VfM dapat mendorong peningkatan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Pelayanan yang lebih baik akan tercipta melalui pengelolaan anggaran yang lebih cermat dan berorientasi pada hasil yang lebih tinggi.
3. Penurunan Biaya Pelayanan Publik: Salah satu manfaat utama dari penerapan VfM adalah berkurangnya pemborosan dalam penggunaan anggaran dan sumber daya. Dengan adanya penghematan yang dihasilkan dari hilangnya inefisiensi, biaya pelayanan publik dapat diturunkan, yang pada gilirannya meningkatkan keberlanjutan dan kelayakan finansial dari program-program yang dijalankan oleh sektor publik.

4. Alokasi Anggaran yang Berorientasi pada Kepentingan Publik: Implementasi VfM juga mendorong alokasi anggaran yang lebih proporsional dan transparan, di mana prioritas pengeluaran difokuskan pada kepentingan umum, bukan pada kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Hal ini sangat penting untuk menjaga integritas dan keadilan dalam distribusi sumber daya publik.
5. Meningkatkan Kesadaran terhadap Dana Publik (Public Cost Awareness): Penerapan prinsip VfM dalam sektor publik juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait pentingnya penggunaan dana publik dengan cara yang lebih akuntabel. Ini menciptakan landasan yang kuat bagi pelaksanaan akuntabilitas publik, yang memastikan bahwa anggaran yang dikelola benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

2.5.2 Komponen-Komponen Value for Money (VfM)

Menurut Mardiasmo (2002), terdapat tiga komponen utama dalam konsep *Value for Money* yang menjadi dasar dalam evaluasi kinerja sektor publik, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Masing-masing komponen ini memiliki peran yang sangat penting dalam menilai sejauh mana suatu organisasi sektor publik berhasil mengelola sumber daya dan mencapai tujuan yang diinginkan:

- 1. Ekonomi:** Ekonomi dalam konteks VfM merujuk pada hubungan antara masukan yang sesungguhnya dengan nilai masukan yang seharusnya digunakan untuk suatu

kegiatan atau program. Konsep ekonomi ini lebih menekankan pada pengadaan sumber daya (input) dengan kualitas dan kuantitas tertentu dengan harga yang seefisien mungkin. Dalam hal ini, ekonomi berfokus pada upaya untuk meminimalkan pengeluaran yang tidak produktif dan menghindari pemborosan dalam penggunaan sumber daya. Tujuannya adalah agar organisasi sektor publik dapat memperoleh hasil yang maksimal dengan biaya yang seminimal mungkin.

- 2. Efisiensi:** Efisiensi merupakan komponen yang mengukur sejauh mana suatu organisasi sektor publik dapat menghasilkan output yang maksimal dengan menggunakan input yang paling sedikit. Pengukuran efisiensi dapat dilakukan dengan membandingkan antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan, berdasarkan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini, efisiensi dapat diukur dengan menggunakan rasio antara output dan input; semakin besar output yang dihasilkan dengan input yang lebih sedikit, maka semakin tinggi tingkat efisiensi yang dicapai oleh organisasi tersebut.
- 3. Efektivitas:** Efektivitas mengukur sejauh mana hasil atau outcome yang dicapai oleh suatu program atau kegiatan sesuai dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara sederhana, efektivitas merupakan perbandingan antara outcome yang dicapai dengan output yang dihasilkan. Pencapaian outcome yang sesuai dengan target menjadi indikator bahwa program atau

kegiatan yang dilaksanakan telah efektif dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Dengan demikian, penerapan analisis *Value for Money* yang komprehensif dan berkesinambungan dapat membawa perbaikan yang signifikan dalam pengelolaan sektor publik, baik dari sisi efisiensi anggaran, kualitas pelayanan publik, maupun akuntabilitas pengelolaan dana publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I., 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Penerbit Erlangga.
- Biduri, 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Modul. Cetakan Pertama. Sidoarjo: UMSIDA Press.
- Halim, A., 2002. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. et al., 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Haryanto, et al., 2014. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jones, P. & Bates, J., 1990. *Public Sector Auditing*. London: Chapman and Hall.
- Jones, R. & Pendlebury, M., 1996. *Public Sector Accounting*. 4th ed. London: Pitman Publishing.
- Mahmudi, 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Ull Press.
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi IV. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Yusra, 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. Modul. Lhokseumawe: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Malikussaleh (UNIMAL).

BAB 3

AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK

Oleh : Franki Maikal Paath, S.E., M.M., Ak., C.A.

3.1 Pendahuluan

Tuntutan akan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan sektor publik semakin mengemuka zaman ini. Organisasi sektor publik, seperti pemerintah daerah, rumah sakit umum, dan lembaga pendidikan, dituntut tidak hanya untuk menyajikan laporan keuangan yang andal, tetapi juga untuk menggunakan informasi akuntansi secara strategis dalam pengambilan keputusan. Di sinilah akuntansi manajemen sektor publik memainkan peran kritis sebagai alat untuk meningkatkan kinerja, mengoptimalkan alokasi sumber daya, dan memastikan bahwa setiap kebijakan publik memberikan dampak yang maksimal bagi masyarakat.

Berikut ini definisi akuntansi manajemen menurut *Institute of Management Accountants*: *"the process of identification, measurment, accumulation analysis, preparation, interpretation and communication of finansial information used by management to plan, evaluate and control within an organization and to assure appropriate use of and accountability for its resources."* Dari definisi di atas dapat diambil intisari bahwa akuntansi manajemen sektor publik erat kaitannya dengan suatu proses identifikasi, pengukuran, kumpulan analisis, perencanaan, intrepertasi

dan komunikasi informasi keuangan yang digunakan oleh manajer sektor publik untuk merencanakan, mengevaluasi dan melakukan kontrol terhadap organisasi sektor publik dan untuk menjamin penggunaan yang wajar dari sumberdaya yang ada dalam organisasi.

3.2 Definisi Akuntansi Manajemen Sektor Publik

3.2.1 Definisi dan Ruang Lingkup Akuntansi Manajemen Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2018), akuntansi manajemen sektor publik adalah alat untuk menyediakan informasi akuntansi yang akan digunakan oleh manajer sektor publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Informasi akuntansi yang diberikan membantu manajer dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengkoordinasian, pengorganisasian dan pengendalian dalam pencapaian tujuan organisasi.

Ruang lingkup akuntansi manajemen sektor publik meliputi empat bagian utama yang bisa dikembangkan, yakni:

1. Perencanaan (*budgeting*)
2. Pengendalian Biaya (*cost control*)
3. Analisis kinerja
4. Akuntabilitas dan pelaporan.

3.2.2 Perbedaan Akuntansi Manajemen Sektor Publik dan Sektor Swasta

Tabel 3.1 Perbedaan Akuntansi Manajemen Sektor Publik dan Sektor Swasta

Deskripsi	Sektor Publik	Swasta
Tujuan	Pelayanan publik, akuntabilitas	Profitabilitas
Sumber Pendanaan	Pajak, Hibah	Investasi, Laba Ditahan
Pengukuran Kinerja	Indikator Kepuasan Masyarakat	Return on Investment, Retur non Equity, Profit

Dari tabel di atas dapat dilihat tiga elemen penting dalam organisasi yang membedakan antara akuntansi manajemen sektor publik dengan akuntansi manajemen sektor swasta. Pada intinya sektor publik lebih mengutamakan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan publik daripada keuntungan organisasi.

3.3 Fungsi Akuntansi Manajemen Sektor Publik

Akuntansi manajemen dalam sektor publik memiliki beberapa persamaan dengan akuntansi manajemen pada perusahaan pada umumnya. Ada dua fungsi utama yang dijalankan yakni sebagai alat perencanaan organisasi dan sebagai alat pengendalian organisasi. Dua fungsi ini yang

BIODATA PENULIS



Margie Christanty Poluan, S.E., M.S.A

Dosen Tetap Pada Program Studi Akuntansi Fakultas
Ekonomi Dan Bisnis Universitas Katolik De La Salle Manado

Margie Christanty Poluan, S.E., M.S.A. lahir di Kota Tomohon pada tanggal 19 Maret 1974. Menyelesaikan studi S1 di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Unika De La Salle Manado dan melanjutkan studi program Magister di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado. Peminatan pada Mata Kuliah Pengantar Ekonomi, MK Akuntansi Sektor Publik, MK Audit Sektor Publik dan MK Kewirausahaan. Saat ini berkarya dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik De La Salle Manado. Email: mpoluan@unikadelasalle.ac.id

BIODATA PENULIS



Franki Maikal Paath, SE, MM., Ak, CA.

Dosen Program Studi Akuntansi.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Universitas Katolik De La Salle Manado.

Penulis lahir di Manado, 25 Mei 1971. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Katolik De La Salle Manado. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado dan pendidikan S2 pada program Magister Manajemen Universitas Sam Ratulangi Manado. Penulis dapat dihubungi pada email fpaaath@unikadelasalle.ac.id

BIODATA PENULIS



Steify M. E. W. Sepang, SE., M.Si., Ak., CA

Dosen Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Katolik De La Salle Manado

Penulis bernama lengkap Steify Mariane Ervina Wonefrida Sepang, SE., M.Si., Ak., CA. Penulis Lulus S1 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sam Ratulangi Manado Tahun 2003; Penulis Lulus S2 Program Studi Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah, Pasca Sarjana Universitas Sam Ratulangi Manado

Pada Tahun 2011 penulis merupakan Dosen tetap di Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Katolik De La Salle Manado. Penulis mengampu Mata Kuliah Analisis & Desain Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Manajemen, Tata Kelola Perusahaan dan Digital Business. Penulis Bersama Tim Universitas telah mengeluarkan Book Chapter dengan judul Kewirausahaan Teori dan Penerapannya untuk Mahasiswa tahun 2024. Saat ini penulis membantu di Yayasan Perguruan Tinggi Universitas De La Salle Manado pada Bagian Keuangan. Penulis dapat dihubungi melalui email : sssepang@unikadelasalle.ac.id

BIODATA PENULIS



Ignatia Rosali Honandar, SE., M.Sc

Dosen Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Katolik De La Salle Manado

Penulis lahir di Tomohon tanggal 25 Mei 1984. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik De La Salle Manado. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Akuntansi di Universitas Katolik De La Salle Manado dan melanjutkan S2 pada Program Magister Sains of Accounting di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ihonandar@unikadelasalle.ac.id

BIODATA PENULIS



Erick Alamsyah Andreas Sumakud, SE., M.A.

Dosen Tetap Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Katolik De La Salle Manado

Penulis lahir di Tomohon, tanggal 9 Januari 1988 dan merupakan dosen tetap pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Katolik De La Salle Manado. Pada tahun 2009 menyelesaikan program pendidikan sarjana ekonomi pada Program Studi Akuntansi di Universitas Katolik De La Salle Manado dan kemudian menyelesaikan program Master of Arts dalam bidang Internationales Management dengan pendalaman IFRS dan Controlling di Technische Universitaet Dresden, Jerman pada tahun 2014. Penulis dapat dihubungi di alamat e-mail: esumakud@unikadelasalle.ac.id

BIODATA PENULIS



Octavianus Marcello Tertius Muaja, S.E., M.M.

Dosen Tetap Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Katolik De La Salle Manado

Penulis lahir di Manado tanggal 24 Oktober 1975. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik De La Salle Manado. Menyelesaikan S1 Akuntansi dari Universitas Trisakti Jakarta. Melanjutkan studi S2 pada Program Magister Manajemen (MM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail omuaja@unikadelasalle.ac.id

BIODATA PENULIS



Ignatius Rolly Coun Rorah, S.S., M.Pd.

Dosen Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Katolik De La Salle Manado

Penulis lahir di Manado, tanggal 17 Oktober 1976. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Katolik De La Salle Manado. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Pineleng; Dan melanjutkan studi S2 pada Program Studi Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Manado. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: irorah@unikadelasalle.ac.id

BIODATA PENULIS



Frankie Jantje Hendrikus Taroreh, S.E., M.M.

Dosen Tetap Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Katolik De La Salle Manado

Penulis lahir di Manado tanggal 21 Oktober 1970. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik De La Salle Manado. Menyelesaikan Diploma III dan S1 Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Trisakti Jakarta. Melanjutkan studi S2 pada Program Magister Manajemen (MM) Konsentrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail ftaroreh@unikadelasalle.ac.id

BIODATA PENULIS



Dr.Mc Donald Ferdinand Steven Porajow, S.E., M.Si

Dosen Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Katolik De La Salle Manado

Penulis telah menyelesaikan pendidikan; Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi (SE) di tahun 1999 dari Universitas Klabat, Magister Sains (M.Si) di tahun 2006 dari Universitas Indonesia. Penulis juga telah menyelesaikan program studi Doktor (S3) di Universitas Sam Ratulangi di tahun 2023. Penulis bersertifikasi sebagai Keahlian Pajak Brevet A-B, berpengalaman sebagai Dosen di Universitas Bunda Mulia (2004-2006) dan sebagai Dosen Tetap di Universitas Katolik De La Salle Manado (2012-Sekarang) serta berpengalaman di perusahaan- perusahaan swasta nasional dan Internasional dari tahun (1999-Sekarang). Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: mporajow@unikadelasalle.ac.id